

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Memasuki awal 2026 Kota Depok mencatatkan inflasi tahunan yang cukup tinggi pada bulan Januari dan Februari dan kemudian melandai pada bulan Maret. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Depok tercatat inflasi tahunan di Januari sebesar 3,13 persen dan meningkat pada Februari menjadi 4,56 persen. Hampir semua kabupaten/kota, provinsi dan bahkan nasional mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan *low base effect* dari penerapan diskon tarif listrik pada Januari hingga Februari tahun lalu. Oleh sebab itu, lonjakan hanya dirasakan secara tahunan, sementara basis bulanan mencatat deflasi 0,16% (m-to-m). Tren deflasi bulanan pada awal tahun ini berlanjut dari tahun lalu yang mencapai 0,76% (mtm) seiring dengan siklus normalisasi sebagian harga pangan dan biaya transportasi. Pada bulan Maret 2026, inflasi Kota Depok mulai mengalami penurunan ke angka 3,45 persen seiring bergesernya periode acuan ke bulan-bulan ketika tarif listrik sudah kembali ke level normal.

Pada Januari 2026, terjadi inflasi y-on-y Kota Depok sebesar 3,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,32 dan tingkat deflasi *m-to-m* serta *y-to-d* masing-masing sebesar 0,16 persen.

Inflasi tahunan Januari 2026, didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, diikuti dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi sebesar 21,23% (YoY) dengan andil 1,06 persen poin dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi 7,67% (YoY) dan andil 1,37 persen poin. Terdapat peningkatan drastis tingkat inflasi pada kedua kelompok tersebut pada Januari tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu utamanya dipicu oleh peningkatan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik. Inflasi akibat tarif listrik terjadi karena *low base effect*, yang mana pada periode yang sama di tahun sebelumnya, diberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan dengan listrik 450 VA hingga 2.200 VA tarif listrik dan ditahun ini ditiadakan untuk diskon tarif listrik. Sementara itu Kelompok Pendidikan juga merupakan salah satu pemberi andil yang cukup tinggi dan memperkuat tekanan pada kelompok pengeluaran ini yang mencatatkan inflasi sebesar 2,64% (YoY). Adapun kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi 1,11% (YoY) dengan andil 0,30 persen poin serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencatat inflasi 1,35% (YoY) dengan andil 0,16 persen poin. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,63 persen.

Secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat deflasi sebesar 0,31% (mtm), diikuti dengan kelompok transportasi dengan tingkat deflasi 0,06% (mtm). Deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipicu oleh masa panen komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah sehingga pasokan mengalami peningkatan dan harga pasar mengalami penurunan. Sementara itu, deflasi pada kelompok transportasi dipicu oleh penurunan harga BBM non-subsidi serta penyesuaian tarif angkutan udara seiring dengan berakhirnya periode libur akhir tahun.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain emas perhiasan, pembersih lantai, beras, parfum, dan tomat. Sedangkan komoditas yang

memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Januari 2026, antara lain: cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan bensin

Pada bulan Februari 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Depok sebesar 4,56% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,03. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Depok bulan Februari 2026 masing-masing sebesar 0,65% dan 0,49%. Hampir semua kabupaten/kota IHK di Jawa Barat mengalami inflasi pada bulan Februari, dan Kota Depok bersama Kota Bandung yang mencatatkan inflasi terendah serta Kota Tasikmalaya mencatatkan inflasi tertinggi diangka 0,97%.

Inflasi y-on-y di bulan Februari 2026 masih didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, diikuti dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi sebesar 22,32% (YoY) dengan andil 1,14 persen poin dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi 12,27% (YoY) dan andil 2,12 persen poin. Selanjutnya disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,55 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,27 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,64 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,32 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,41 persen; kelompok transportasi sebesar 0,50 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,84 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Februari 2026, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, bawang merah, air kemasan, upah asisten rumah tangga, sigaret kretek mesin (SKM), ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, dan telur ayam ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: bensin, cabai merah, tarif kendaraan roda 2 online, popok bayi sekali pakai/diapers, sabun detergen bubuk, obat gosok, pembersih lantai, bawang putih, wortel, pengharum cucian/pelembut.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain emas perhiasan, beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Februari 2026, antara lain: bensin, tarif kendaraan roda dua online, wortel, biskuit, dan shampo.

Menutup Triwulan-I 2026, inflasi Maret di Kota Depok menunjukkan tren normalisasi dan kembali ke dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 3,45% (YoY), lebih rendah dari lonjakan 4,56% (YoY) pada Februari 2026. Penurunan ini dipengaruhi oleh meredanya pengaruh low-base effect, terutama pada komponen harga yang diatur pemerintah. Meski terjadi penurunan, tekanan harga belum sepenuhnya hilang dan masih dibayangi perkembangan global yang berasal dari lonjakan harga energi minyak dan gas akibat eskalasi perang di Timur Tengah. Inflasi bulanan Maret 2026 juga tercatat menurun menjadi 0,63% (mtm) dibandingkan 1,71% (mtm) pada bulan yang sama tahun lalu. Penurunan ini lebih rendah dari ekspektasi musiman mengingat berlangsungnya bulan Ramadan, pekan liburan perayaan Hari Nyepi, serta Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026.

Secara tahunan, inflasi Maret 2026 ditopang oleh dinamika yang cukup beragam antar kelompok pengeluaran. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga

masih menjadi penyumbang andil terbesar dengan inflasi 6,19% (YoY) dan andil 1,18 persen poin. Namun demikian, angka ini mencerminkan perlambatan yang cukup tajam dari 12,27% (YoY) pada Februari 2026. Memasuki Maret 2026, pengaruh low-base effect akibat diskon tarif listrik 50% yang diberlakukan di awal 2025 mulai meredup seiring bergesernya periode acuan ke bulan-bulan ketika tarif listrik sudah kembali pada level normalnya. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih memiliki andil yang cukup tinggi terhadap inflasi, yakni 21,02% (YoY) dengan andil 1,07 persen poin. Kenaikan harga emas perhiasan menjadi salah satu pendorong tekanan pada kelompok ini, didorong oleh ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi risiko geopolitik yang terus mendorong emas ke posisi sebagai aset pelindung nilai paling diminati. Meskipun pada bulan Maret 2026, inflasi kelompok ini sedikit melandai dari 22,32% (YoY) pada Februari 2026 akibat penurunan sedikit pada harga emas. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 3,29% (YoY) dengan andil 0,93 persen poin, bergerak sedikit menurun sejak Februari 2026 yang mencatat inflasi sebesar 3,55%(YoY). Disamping itu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatatkan inflasi sebesar 1,09 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen; kelompok transportasi sebesar 0,28 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,19 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,64 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,34 persen.

Dari sisi bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Maret 2026 dengan inflasi 0,43%. Tekanan pada kelompok ini tidak terlepas dari faktor musiman Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1447H yang secara historis mendorong peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan diantaranya beras dan daging ayam ras. Selain itu kelompok transportasi mencatat inflasi sebesar 0,15 %, didorong oleh peningkatan mobilitas selama Ramadan dan Lebaran

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain beras, angkutan antar kota, daging ayam ras, bensin dan kangkung. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Maret 2026, antara lain: emas perhiasan, biskuit, pir, apel, dan parfum.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Pada awal tahun dibulan Januari 2026 Kota Depok mengalami deflasi bulanan m-to-m sebesar 0,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari angka deflasi m-to-m Jawa Barat sebesar 0,09 persen dan sedikit lebih tinggi dengan angka deflasi m-to-m nasional 0,15 persen.
- Deflasi yang terjadi di Kota Depok didorong oleh penurunan harga bahan makanan, terutama komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, serta daging/telur ayam ras. Hal ini disebabkan penurunan harga bahan pangan (cabai rawit, cabai merah, bawang merah, daging, ayam ras, dan telur ayam ras) akibat pasokan yang cukup. Kelompok makanan minuman dan tembakau mencatat deflasi tertinggi (0,28%). Selain itu, penurunan harga BBM turut berkontribusi pada deflasi kelompok transportasi.
- Selain itu Inflasi Kota Depok pada Triwulan 1 tahun 2026 didorong oleh peningkatan permintaan kebutuhan pokok selama Ramadhan dan Idulfitri, terutama pada Maret 2026. Faktor pendorong utamanya meliputi kenaikan harga pangan dan komoditas strategis, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta dampak volatilitas harga global. Inflasi *year-on-year*(y-on-y) tercatat naik signifikan menjadi 4,56 persen pada Februari 2026

Momen Ramadhan dan Idul Fitri di bulan Maret 2026 mendorong kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok, memicu inflasi bulanan yang lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah membuat Depok rentan terhadap fluktuasi harga komoditas strategis. Peningkatan harga komoditas pangan dan komoditas strategis lainnya, dipengaruhi pula oleh harga bahan bakar minyak (BBM). Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan harga komoditas global, termasuk dampak konflik regional, turut memengaruhi tekanan inflasi di Kota Depok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kota Depok pada Triwulan I Tahun 2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok melalui strategi 4K diantaranya :

1. Keterjangkauan Harga

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Pasar Murah Ramadhan pada 7 (tujuh) titik lokasi kelurahan di wilayah Kota Depok (Kelurahan Duren Seribu, Pondok Petir, Bedahan, Pangkalan Jati, Ratu Jaya, Kalimulya, Pasir Gunung Selatan) kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin atau rentan miskin di 7 Kelurahan Kota Depok.;
 2. Melaksanakan Pasar Murah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 127 Tahun 2026, bertempat di Lapangan Pamoras Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin atau rentan miskin di wilayah Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
 3. Melaksanakan Pasar Murah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Maret 2026, di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Pancoran Mas. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin atau rentan miskin di wilayah Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Pancoran Mas. Dalam kegiatan OPADI ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan sebanyak 1.586 paket murah (subsidi 50.31%) untuk wilayah Kota Depok;
 4. Melakukan pemantauan harga harian komoditas kebutuhan pokok masyarakat di took swalayan, agen/distributor dan pasar rakyat yang ada di Kota Depok meliputi ; Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, dan Pasar Kemiri Muka untuk memastikan ketersediaan pasokan dan antisipasi terhadap kenaikan harga yang mungkin terjadi;
 5. Melakukan *Updating* Harga Pangan melalui Aplikasi Sifordagin yang terintegrasi dengan Aplikasi *Silinda di Jabar* milik Provinsi Jawa Barat dan SP2KP Kementerian Perdagangan;
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok
 1. Melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang difasilitasi oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026, berlokasi di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
 2. Melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) mandiri yang bekerjasama dengan BI. Kegiatan ini dilaksanakan 4 kali yaitu : pada tanggal 10 Februari 2026 di Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas, tanggal 6 Maret 2026 di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong, tanggal 10 Maret 2026 di Kecamatan Pancoran Mas, tanggal 11 Maret di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
-

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Depok.

1. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447H, Pemerintah Kota Depok melalui TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyelenggarakan rapat koordinasi high level meeting. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan stakeholder terkait merumuskan langkah pengendalian inflasi yang efektif dan terintegrasi.
2. Melaksanakan sidak Pasar TPID Kota Depok menjelang hari besar keagamaan nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H pada tanggal 11 Februari 2026 di Pasar Agung, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

2. Ketersediaan Pasokan

- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok, melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan produksi benih ikan konsumsi dalam rangka mendukung ketersediaan ikan, kegiatan ini menghasilkan produksi benih ikan konsumsi sebanyak 81.500 ekor benih;
 2. Melaksanakan pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dalam rangka mendukung penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selama triwulan I Rumah Potong Hewan telah melaksanakan pemotongan hewan sebanyak 2.939 ekor setara dengan 734.750kg daging;
 3. Melaksanakan pemanfaatan lahan tidur untuk produksi pertanian bekerjasama dengan TNI dan Polri. Dalam kegiatan ini telah dilakukan penyediaan bibit dan benih tanaman untuk dibagikan kepada masyarakat maupun instansi sebagai stimulan dalam pemanfaatan lahan tidur;
- Dinas Kesehatan Kota Depok
 1. Melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar rakyat maupun toko modern yang ada di Kota Depok bekerjasama dengan BPOM;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan komitmen SPP IRT (sertifikasi pemenuhan komitmen pangan olahan industri rumah tangga) dengan kegiatan kunjungan langsung ke sarana IRTTP untuk memastikan penerapan cara produksi pangan yang baik;
 3. Melaksanakan kegiatan pengujian sampel pangan IRTTP dengan sasaran 60 pengawasan label kemasan dari anggaran APBD, dengan tujuan untuk memeriksa apakah suatu makanan aman dan tidak mengandung kontaminan berbahaya, demi ketersediaan pangan yang aman dan sehat di lingkungan Kota Depok;

3. Kelancaran Distribusi

- Dinas Perhubungan Kota Depok
 1. menyusun kajian/kebijakan terkait dengan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang (moda share, kinerja angkutan penumpang umum evaluasi jaringan lintas batas dan pola pergerakan masyarakat angkutan umum Kota Depok;
 2. melakukan kerjasama penyediaan angkutan penumpang "Biskita Trans Depok" dan "Mikro Trans Depok" dengan instansi pusat swasta;
 3. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengaturan jam operasional angkutan barang untuk jalan lintas provinsi dan nasional;
 4. melakukan pengamanan lalu lintas barang menuju pusat distribusi barang;
 5. melakukan penyediaan sarpras penerangan jalan pada lintasan angkutan barang (PJU);
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok :

Melakukan pemantauan, pemeliharaan dan rekonstruksi jalan dalam rangka memastikan kelancaran distribusi pangan di Kota Depok

4. Komunikasi Efektif

- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Depok selaku Sekretariat TPID Kota Depok melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan sinergi upaya pengendalian inflasi khususnya menjelang momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi High Level Meeting, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Februari 2026;
- Mengedukasi masyarakat untuk bijak berbelanja menghadapi momentum HBKN Idul Fitri melalui platform media Pemerintah Kota Depok.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian semua pihak. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kurang bermakna apabila diikuti oleh kenaikan inflasi yang tinggi pula, upaya pengendalian inflasi akan selalu menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama bagi Kota Depok yang secara karakteristik bukan daerah produsen dan Kota Depok lebih dari 95% pemenuhan kebutuhannya bergantung dari pasokan daerah
- Kegiatan-kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi di Kota Depok telah banyak dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Depok, namun demikian perlu lebih ditingkatkan kembali koordinasi dan sinergi agar upaya yang dilakukan bisa memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- Koordinasi semua pihak, terutama Kolaborasi dan Sinergi diantara Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok perlu terus diperkuat sehingga pihak terkait dapat mensinergikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Melalui Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID Kota Depok juga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen semua pihak dalam mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi berbagai isi pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah :

1. Mengantisipasi Momen HBKN Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1447 H ; Momen-momen ini berdasarkan data historis dapat menimbulkan gangguan pada sisi supply atau ketersediaan pasokan, untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan yang baik, sehingga perlu langkah kongkret dalam memastikan ketersediaan pasokan yang cukup dan jangan sampai terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok di Kota Depok.
2. Mengintensifkan Pemantauan Pergerakan Harga Secara Harian, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara harian melalui kontributor yang ada di Pasar Rakyat yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir. Lebih lanjut, TPID dapat memanfaatkan Aplikasi Sifordagin dan Silinda Di

Jabar untuk melakukan pemantauan kenaikan/penurunan harga pangan untuk pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan cepat.

3. Memastikan Ketersediaan Stok dan Pasokan Bahan Pokok Penting serta Pemasaran via Platform Digital; Memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar rakyat dan pasar ritel modern dengan intens melakukan koordinasi ke agen dan distributor serta Bulog Cabang Bogor jika dipertimbangkan perlu dilakukan Pasar Murah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat jika ketersediaan barang sedikit atau ada kenaikan harga komoditas yang signifikan.
4. Pemasaran via Platform Digital; Platform perdagangan online juga dapat dijadikan alternative solusi bagi pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok terutama untuk meningkatkan transaksi secara digital di Kota Depok dan meningkatkan omzet pedagang serta memudahkan masyarakat selaku pembeli, selain itu melalui pemasaran digital ini juga diharapkan mampu meningkatkan omzet usaha penggiat UMKM di Kota Depok.
5. Berkoordinasi dan Bekerjasama dengan Forkopimda; Melakukan Koordinasi untuk memperoleh pendampingan selama pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi, terutama apabila diperlukan melakukan tindakan korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi serta penimbunan, termasuk pengawasan penyaluran distribusi BBM dan LPG dengan Satgas Pangan Polres Depok, Kejaksaan Negeri Kota Depok dan Kodim 0508 Kota Depok.
6. Memastikan Efektivitas Penetapan Lokasi, Waktu dan Frekuensi Operasi Pasar Murah Bersubsidi, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani; Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani untuk memastikan efektivitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya. Berbagai kegiatan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan oleh pihak diluar Pemerintah Kota Depok diupayakan berkoordinasi dengan TPID untuk menghindari potensi ketidaktepatan penyaluran dan memastikan pemerataannya dan didorong untuk dapat dilaksanakan lebih banyak lagi diseluruh wilayah Kota Depok.
7. Moral Situasion dan sinergi komunikasi kebijakan antar stakeholder untuk Mengelola Ekspektasi Masyarakat. Melakukan Moral Suasion dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok seperti melalui:
 - Mengkomunikasikan kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga keterjangkaun harga dan ketersediaan stok melalui info grafis di berbagai media yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo;
 - Perlu dipertimbangkan untuk melibatkan Tenaga Bimroh dalam membantu menyampaikan pesan pengendalian inflasi dalam setiap konten ceramah berupa himbauan kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja;
 - Melakukan Sidak ke pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga serta himbauan kepada para pedagang/distributor untuk tidak menahan ataupun menimbun pasokan.